

PENGARUH PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH UNTUK MENCAIPAI *LIVABLE SETTLEMENT* DI KELURAHAN TAMBAKREJO KOTA SEMARANG

Jurnal Pengembangan Kota (2017)

Volume 5 No. 2 (140-148)

Tersedia online di:

<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

DOI: 10.14710/jpk.5.2.140-148

Leylita Hariaty Gultom^{*}, Sunarti

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,
Universitas Diponegoro

Abstrak. Keterbatasan kemampuan masyarakat baik secara ekonomi dan mengelola ruang menimbulkan kondisi kumuh di Kelurahan Tambakrejo. Pada tahun 2015-2017 kemudian dilakukan penataan permukiman kumuh, tetapi belum mencapai *livable settlement* seperti kondisi lingkungan yang diinginkan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh penataan permukiman kumuh untuk mencapai *livable settlement* di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang berdasarkan persepsi penghuni. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kuantitatif, dengan alat analisis berupa deskriptif, skala likert dan regresi linear sederhana. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa penataan kumuh di Kelurahan Tambakrejo belum mencapai *livable*. Terdapat 2 aspek yang dipengaruhi yaitu fisik dan sosial. Selanjutnya, berdasarkan persepsi masyarakat terhadap 6 kriteria *human settlement* yang dipengaruhi penataan kumuh antara lain kemudahan akses, kepuasan terhadap sarana prasarana, sarana prasarana pendukung kegiatan, biaya perbaikan rumah sedikit, peran lembaga menjalankan program, dan terjalin kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Kata kunci: permukiman kumuh; *livable settlement*; *human settlement*

[Title: The Effect of Slum Area Arrangements to Achieve Livable Settlement in Tambakrejo Urban Village, Semarang City]. *Limited ability of society both economically and managing space cause slum condition in Tambakrejo Urban Village. In 2015-2017, the local government conducted slum arrangement, however the results have not yet reached livable settlement as stated in the program aim. Hence, the purpose of this research is to know the effect of settlement arrangement in order to reach livable settlement in Tambakrejo Urban Village Semarang based on the perception of the inhabitants. The research is quantitative, using descriptive analysis tool, likert scale and simple linear regression. This research finds that slum arrangement in Tambakrejo Village has not reached livable condition. From 3 aspects that must be realized, the program only affected 2 aspects that is physical and social, while the economic aspect is still not influenced by the arrangement. Furthermore, the community's assessment on 17 criteria of human settlement as convenience parameters, found that 6 criteria were influenced by the program, that is, access, satisfaction of infrastructure, infrastructure support activities, small home improvement costs, the role of socializing institutions, and guaranteed cooperation of government, private, and community.*

Keyword: slums; *livable settlements*; *human settlement*

Cara Mengutip: Gultom, L. H., & Sunarti. (2017). Analisis Keberlanjutan Home Based Enterprise Pengolahan Singkong di Kota Salatiga. *Jurnal Pengembangan Kota*. Vol 5 (2): 140-148. DOI: 10.14710/jpk.5.2.140-148

1. PENDAHULUAN

Fenomena urbanisasi terjadi hampir di seluruh wilayah perkotaan Indonesia, seperti halnya yang terjadi di Kota Semarang. Ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi mendorong munculnya masyarakat miskin perkotaan dan berdampak pada pemenuhan kebutuhan hunian sehingga menggeser pertumbuhan permukiman kumuh di pinggiran kota (Hariyanto, 2010).

Permukiman kumuh dapat diartikan sebagai tempat tinggal penduduk miskin di pusat kota dan permukiman padat tidak teratur di pinggiran kota

ISSN 2337-7062 (print), 2503-0361 (online) © 2017

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>). – lihat halaman depan © 2017

*Email: leylita.hariaty17@pwk.undip.ac.id

Diterima 16 Oktober 2017, disetujui 3 Desember 2017

dengan penghuni umumnya berasal dari para migran luar daerah yang sebagian merupakan permukiman ilegal/permukiman liar (UN Habitat, 2003). Karakteristik dasar kumuh merupakan suatu kondisi rumah yang buruk, pencahayaan yang tidak memadai, kurangnya air minum yang aman, *air logging* saat hujan, tidak adanya fasilitas toilet dan non-ketersediaan dasar pelayanan fisik dan sosial (Chandramouli, 2003). Kawasan kumuh memiliki ciri-ciri kondisi rawan lingkungan fisik kurang layak huni, kondisi ekonomi rendah, kondisi sosial rendah dan secara hukum masih terdapat hunian yang tidak sesuai dengan aturan atau RTRW yang berlaku (Alit, 2005).

Kelurahan Tambakrejo, sebagai salah satu kelurahan di pinggiran Kota Semarang menjadi salah satu lokasi permukiman bagi masyarakat miskin. Hal tersebut karena lokasinya yang cukup strategis bagi tumbuhnya permukiman kumuh. Terbentuknya kondisi kumuh ini menunjukkan adanya keterbatasan kemampuan masyarakat baik secara ekonomi dan kemampuan dalam mengelola ruang sehingga diperlukan bantuan pemerintah untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh.

Upaya untuk mewujudkan permukiman yang *livable* dilakukan melalui program penataan permukiman kumuh yang diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan lingkungan fisik, ekonomi dan komunitas sosial masyarakat, terutama terkait erat dengan elemen *human settlement* pada permukiman kumuh. Penataan lingkungan atau kawasan merupakan suatu usaha memperbaiki, mengubah, mengatur kembali lingkungan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang yang menunjukkan adanya perbandingan hasil dengan program atau program (Hariyanto, 2010). Bila dikaitkan dengan konsep *livable settlement*, program penataan permukiman harus mampu mewujudkan suatu ruang yang layak dan nyaman bagi penghuninya untuk tinggal maupun bekerja.

Livable Settlement berkaitan dengan kesempatan seseorang untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, daerah yang aman dari tindak kejahatan, daerah yang memiliki akses terhadap fasilitas yang memadai sehingga tidak timbul suatu kekhawatiran terhadap kenyamanan masyarakat (Silondae,

2010). Permukiman yang nyaman terwujud dalam 3 komponen fisik, sosial dan ekonomi yaitu tidak terjadi degradasi lingkungan dengan adanya penyediaan lapangan kerja, partisipasi masyarakat yang aktif dan tersedia lapangan pekerjaan (Firdaus & Nurini, 2015). Dalam konsep permukiman, *livability* merupakan gambaran pencapaian kualitas hidup dari suatu kawasan hunian. Prinsip-prinsip permukiman seperti yang dirumuskan oleh Doxiadis (1976) menunjukkan konsep kualitas hidup menjadi parameter kenyamanan masyarakat untuk tinggal di suatu wilayah. Kualitas hidup dibentuk oleh tiga aspek yang saling beririsan yaitu *livability*, *sustainability*, dan *viability* (Sariffuddin & Susanti, 2011). Kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tolak ukur kenyamanan masyarakat dilihat pada masing-masing elemen *human settlement* yang mencakup *man* (kapasitas ekonomi), kondisi lingkungan permukiman (*nature*), kualitas rumah (*shell*), kondisi sosial masyarakat (*society*), dan *network*.

Pengaruh penataan permukiman kumuh melalui program penataan permukiman merujuk pada 2 hal yaitu perbedaan antara indikator hasil dengan program dan indikator hasil tanpa program (Yulianti, Baiquni, Ritohardoyo, Yunus, & Setiawan, 2016). Penanganan permasalahan permukiman kumuh khususnya di Kelurahan Tambakrejo, Pemerintah Kota Semarang membuat beberapa program penanganan sarana dan prasarana sehingga pada tahun 2019 diharapkan tidak ada lagi permukiman kumuh di kawasan ini di antaranya melalui PLPBK dan NUSP-2 (Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, 2016).

Sesuai dengan kebijakan penanganan kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, pada tahun 2015-2016 program PLPBK dan NUSP-2 mampu mengurangi kawasan kumuh dari total 5,23 Ha menjadi 2,36 Ha (Dinas Permukiman Kota Semarang, 2015). Namun, meskipun sudah ada program penataan permukiman kumuh di Tambakrejo, kondisi wilayah ini masih kumuh. Tentunya kondisi ini belum memenuhi permukiman yang nyaman (*livable settlement*).

Secara fisik, kondisi sarana prasana wilayah penelitian masih belum mendukung seperti kondisi drainase, persampahan yang masih buruk, dan sebagian masyarakat masih ada yang belum

memiliki MCK pribadi. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya juga masih kurang dan masih banyak penduduk miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah (\pm 1 juta). Dilatarbelakangi situasi tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penataan permukiman kumuh untuk mencapai *livable settlement* di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang.

Terdapat 6 sasaran untuk mencapai tujuan tersebut, sebagai berikut: (1) mengidentifikasi hasil pelaksanaan program penataan permukiman kumuh yang sudah berjalan di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang mulai tahun 2014 sampai saat ini, (2) menganalisis perbandingan kondisi aspek fisik lingkungan permukiman sebelum dan setelah penataan kumuh,

(3) menganalisis perbandingan kondisi aspek ekonomi dan sosial sebelum dan setelah penataan kumuh, (4) menganalisis persepsi masyarakat terhadap variabel *human settlement* di Kelurahan Tambakrejo, (5) menganalisis pengaruh penataan permukiman kumuh untuk mencapai *livable settlement* di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang. Lingkup wilayah pada penelitian ini yaitu RW 5, 6 dan RW 8, 9 Kelurahan Tambakrejo yang berada di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang (Gambar 1). Wilayah ini merupakan lokasi yang cukup strategis bagi perkembangan permukiman karena dilalui oleh jalan arteri Kaligawe dan Kom Yos Sudarso.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif, sesuai dengan kajian yang didasarkan terhadap obyek yang diteliti yaitu permukiman (Sugiyono, 2007). Alat analisis terdiri dari analisis deskriptif, analisis dengan menggunakan skala likert dan analisis regresi linear sederhana. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang pengaruh penataan permukiman kumuh dalam mencapai *livable Settlement*. Bobot nilai yang digunakan dengan skala likert terdiri dari 1-5 yang menunjukkan persepsi masyarakat mengenai kriteria *human settlement* (lihat Tabel 1). Adapun perhitungan bobot nilai menggunakan rumus indeks % = total skor/Y x 100.

Tabel 1. Bobot Nilai Penilaian Masyarakat Terhadap Elemen *Human Settlement*

Persepsi masyarakat	Keterangan
0 % - 19,99 %	Sangat lemah (tidak setuju, buruk atau kurang sekali)
20 % - 39,99 %	Tidak setuju atau kurang baik
40 % - 59,99 %	Cukup atau Netral
60 % - 79,99 %	Setuju, baik atau suka
80 % - 100 %	Sangat (Setuju, baik, suka)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan survei berupa kuesioner, observasi, dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Perumahan dan Permukiman serta Bappeda Kota Semarang. Responden dalam penelitian ini terdiri



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian RW 5, 6, 8, dan 9 Kelurahan Tambakrejo (BAPPEDA Kota Semarang, 2011)

dari masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan langsung melalui penataan permukiman kumuh dan masyarakat yang mendapatkan manfaat dengan adanya penataan kumuh. Jumlah KK miskin pada lokasi penelitian sebanyak 840 KK.

Adapun penentuan sampel penelitian dengan menggunakan *purposive sampling* sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Akbar & Usman, 2006). Hal ini didasarkan pada kriteria masyarakat miskin yang mendapatkan dan merasakan dampak penataan permukiman kumuh. Jumlah sampel penelitian yaitu 90, yang ditentukan berdasarkan rumus slovin (Sujarweni & Endrayanto, 2012). Pembagian sampel penelitian sesuai dengan perhitungan (Sugiyono, 2013):

$$n_x = \frac{Nx}{N^{x_n}}$$

Jumlah sampel di RW 5 sebesar 31, RW 6 = 30, RW 8 = 17, dan RW 9 = 11.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penataan permukiman kumuh di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang pada tahun 2015-2016 terdiri dari PLPBK dan NUSP-2 (Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, 2016). Program yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan ini dilakukan untuk mewujudkan kondisi lingkungan permukiman yang nyaman (*livable*). *Livable settlement* bisa dilihat dalam beberapa aspek antara lain secara fisik, ekonomi dan sosial. *Livable Settlement* menunjukkan suatu kondisi yang nyaman secara fisik (tidak terjadi degradasi lingkungan), nyaman secara sosial (partisipasi masyarakat yang aktif, dan secara ekonomi (tersedianya lapangan pekerjaan).

3.1 Kondisi Aspek Fisik Sebelum dan Setelah Penataan Permukiman Kumuh

Aspek fisik permukiman kumuh kelurahan Tambakrejo mencakup rumah dan sarana prasana yang terdiri dari jalan, air bersih, drainase, sanitasi, dan persampahan mengalami perubahan kondisi karena adanya penataan kumuh. Sebelumnya, banyak dari sarana prasana kurang mendukung

untuk mencapai permukiman yang layak huni bahkan sampai saat ini juga.

Secara lebih rinci, pengaruh penataan permukiman kumuh yakni kondisi rumah mengalami peningkatan kualitas menjadi lebih baik dilihat pada perubahan dinding dan atap, sedangkan untuk lantai masih belum ada perubahan kondisi masih rusak karena pengaruh penataan. Jika dibandingkan dengan kriteria rumah layak huni atau sehat, kondisi rumah saat ini masih belum layak khususnya lantai bangunan meskipun sudah ada penataan. Kondisi jalan mengalami peningkatan kualitas yang awalnya permukaan jalan dominan tanah dan paving sekarang sudah paving dengan kondisi cukup baik, selain itu akses ke berbagai aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah. Kebutuhan air minum masyarakat sudah terpenuhi dan mampu melayani kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari ditambah lagi dengan penambahan sumber air berupa penyediaan sarana menara air.

Kondisi jaringan drainase sebelum penataan kumuh masih belum baik terlihat dari kualitas permukaan jaringan yang masih didominasi tanah dan beton yang rusak. Kondisi sanitasi di Kelurahan Tambakrejo belum 100 % mampu melayani masyarakat sehingga belum memenuhi lingkungan yang nyaman bagi sebagian masyarakat. Meskipun telah ada penambahan MCK umum melalui penataan, tetap saja kualitas sarana masih buruk karena kurang terlayani air bersih sehingga lambat laun mengalami penurunan kualitas dan peran masyarakat dalam merawat MCK tersebut. penataan kumuh untuk persampahan masih belum mampu melayani masyarakat, perlu penambahan 1 TPS di RW 05 dan 06 serta peningkatan sistem pengangkutan sampah. Selain itu, perlu kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di kali dan rel kereta api yang membuat kondisi lingkungan yang semakin kumuh.

3.2 Kondisi aspek ekonomi dan aspek sosial sebelum dan setelah penataan kumuh

Analisis kondisi perekonomian masyarakat dilihat pada tingkat pendapatan dan mata pencaharian. Pengaruh penataan kumuh di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang tidak secara signifikan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Salah satu manfaat yang dirasakan terhadap kondisi perekonomian yaitu kemudahan akses menuju tempat kerja karena perbaikan jalan yang nantinya berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat dalam bekerja. Kondisi sosial masyarakat didasarkan pada beberapa aspek antara lain partisipasi masyarakat aktif, ketersediaan sarana dan prasana sosial, dan bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan.

Pengaruh penataan kumuh menunjukkan adanya suatu perubahan secara sosial yaitu interaksi warga semakin meningkat, intensitas gotong royong semakin sering dilakukan. Peningkatan intensitas gotong-royong ini menunjukkan adanya suatu perubahan perilaku masyarakat yang semakin sadar lingkungan. Bentuk partisipasi masyarakat di Kelurahan Tambakrejo berupa sumbangan tenaga, ide, dan uang. Meskipun demikian, masih belum terdapat sarana sosial di Kelurahan Tambakrejo yang diharapkan semakin menunjang kegiatan masyarakat.

3.3 Persepsi masyarakat terhadap *human settlement*

Dalam konsep permukiman, konsep kualitas hidup menjadi suatu parameter kenyamanan masyarakat untuk tinggal. Prinsip-prinsip permukiman sesuai dengan teori Doxiadis (1976) yaitu *human settlement* dengan elemen antara lain *man*, *society*, *shells*, *nature*, dan *network*, kemudian dijabarkan menjadi 17 indikator (Sariffuddin & Susanti, 2011).

Persepsi masyarakat terhadap 17 indikator terdiri dari persepsi mengenai kapasitas ekonomi (*man*): tingkat pendapatan, mata pencaharian dan akses menuju tempat kerja (lihat Tabel 2). Persepsi mengenai kondisi lingkungan (*nature*) meliputi kualitas sarana prasana dan bencana alam. Persepsi mengenai kualitas rumah (*shells*) meliputi status kepemilikan rumah, biaya perbaikan rumah, dan kondisi rumah. Persepsi mengenai kondisi sosial masyarakat (*society*) meliputi hubungan antarmasyarakat, sosialisasi yang baik, saling membantu, dan adanya peran lembaga masyarakat bersosialisasi.

Persepsi masyarakat terhadap hubungan masyarakat dengan sekitarnya (*network*) meliputi terjalannya kerjasama, perhatian terhadap

kebutuhan masyarakat miskin, dan meningkatnya kerjasama masyarakat. Analisis persepsi masyarakat mengenai *human settlement* memberikan gambaran mengenai interpretasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan permukiman yang dirangkum dalam 5 elemen *human settlement* (Doxiadis, 1976; Sariffuddin & Susanti, 2011).

Persepsi masyarakat terhadap kapasitas ekonomi (*man*), yaitu sebanyak 62,2 % masyarakat setuju bahwa kemudahan akses dalam masyarakat mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan keberhasilan penataan yang mendorong peningkatan pendapatan dan munculnya mata pencaharian baru masyarakat di Kelurahan Tambakrejo nantinya.

Persepsi masyarakat terhadap kondisi lingkungan permukiman (*nature*) meliputi kualitas sarana prasana yang mendukung dan bencana alam. Sesuai dengan persepsi masyarakat, kondisi lingkungan mengalami peningkatan yang semakin baik dan didukung dengan pelayanan sarana prasana. Ketersediaan sarana dan prasana mampu menunjang kegiatan masyarakat

Persepsi masyarakat terhadap kualitas rumah (*shells*) meliputi status kepemilikan rumah, biaya perbaikan rumah dan kondisi rumah. Sesuai dengan persepsi masyarakat status kepemilikan rumah tidak mengalami perubahan sama sekali dengan adanya penataan kumuh, berkaitan dengan biaya sebanyak 92,2 % masyarakat setuju bahwa biaya yang mereka keluarkan untuk memperbaiki rumah berkurang dan rumah mereka menjadi semakin bersih dan terlayani air bersih.

Adapun persepsi masyarakat terhadap kondisi sosial masyarakat (*society*): meliputi hubungan antarmasyarakat, sosialisasi yang semakin baik, saling membantu, dan adanya peran lembaga. Sesuai dengan persepsi masyarakat, penataan kumuh mempengaruhi kondisi sosial menjadi semakin baik, dimana interaksi masyarakat menjadi semakin baik dan harmonis, saling membantu jika ada kesusahan, dan lembaga berperan aktif memberikan sosialisasi bagi masyarakat jika ada kegiatan.

Persepsi masyarakat mengenai hubungan masyarakat dengan sekitarnya (*network*) dilihat pada kerjasama yang semakin meningkat, terdapat perhatian terhadap kebutuhan masyarakat miskin, dan terjalin kerjasama yang baik antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sesuai dengan persepsi

masyarakat, hubungan masyarakat semakin meningkat dan terjalin kerjasama yang baik antar pemerintah, masyarakat dan swasta, serta adanya suatu perubahan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

Tabel 2. Bobot Nilai Persepsi Masyarakat Terhadap Elemen *Human Settlement*

No	Kriteria	Persepsi masyarakat					Capaian
		STS	TS	BS	S	SS	
1	Tingkat pendapatan meningkat			✓			59,9%
2	Perubahan mata pencaharian			✓			59,9%
3	Menjamin akses ke berbagai aktivitas masyarakat				✓		84%
4	Kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana				✓		82,6%
5	Sarpras mendukung kegiatan masyarakat sehari-hari				✓		84,2%
6	Lingkungan nyaman, tidak ada rob/banjir				✓		82,2%
7	Pendapatan bertambah			✓			60,8%
8	Status kepemilikan rumah			✓			59,9%
9	Biaya perbaikan rumah semakin sedikit				✓		62%
10	Kondisi rumah bersih dan terlayani air bersih				✓		62%
11	Interaksi masyarakat baik dan harmonis				✓		81,5%
12	Tersedia wadah/sarana organisasi			✓			59,9%
13	Hubungan masyarakat semakin erat				✓		86,2%
14	Lembaga masyarakat berperan memberikan sosialisasi				✓		76,8%
15	Kerjasama antar masyarakat semakin meningkat				✓		81,5%
16	Kebutuhan masyarakat miskin diperhatikan			✓			68%
17	Terjalin kerjasama antara pemerintah masyarakat dan swasta				✓		83,1%

Ket: SS (Sangat setuju), S (Setuju), BS (Biasa saja), TS (tidak setuju), dan STS (Sangat tidak setuju)

Perhitungan nilai capaian bisa dilihat pada lampiran.

Kriteria terpilih yaitu nilai capaian variabel ≥ 60

Dengan menggunakan nilai capaian variabel ≥ 60 , dapat disimpulkan bahwa penataan permukiman kumuh di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang (Tabel 2) tidak mempengaruhi semua elemen permukiman. Beberapa kriteria yang dipengaruhi antara lain menjamin akses ke berbagai aktivitas, kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sehari-hari, lingkungan nyaman (tidak rob/banjir), pendapatan bertambah, biaya perbaikan rumah semakin sedikit, kondisi rumah menjadi bersih dan terlayani air bersih, interaksi masyarakat baik dan harmonis, saling membantu jika ada hajatan, lembaga masyarakat berperan dalam memberikan sosialisasi, kerjasama antarmasyarakat semakin meningkat, kebutuhan masyarakat miskin diperhatikan, serta terjalin kerjasama antara pemerintah masyarakat dan swasta. Adapun sesuai dengan persepsi masyarakat, diketahui bahwa elemen *human settlement* yang paling dipengaruhi

oleh penataan permukiman kumuh secara berturut-turut yaitu *shells, nature, network, social*, dan terakhir yaitu elemen *man*. *Shells* merupakan elemen yang paling dipengaruhi oleh penataan permukiman kumuh. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa kondisi permukiman kumuh yang sangat identik dengan kondisi dan kualitas bangunan yang minim dan tidak tertata dengan baik, misalnya terlihat pada banyaknya bangunan liar dan tingkat kepadatan (Santoso & Therik, 2016).

3.4 Pengaruh penataan permukiman kumuh terhadap elemen *human settlement* mencapai *livable settlement* di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang

Livable settlement bisa diartikan sebagai permukiman yang layak huni yang mencakup 3 komponen aspek penting yaitu aspek fisik baik alam maupun sarana prasarana, aspek ekonomi seperti

tingkat pendapatan, mata pencaharian, dan akses menuju tempat kerja, dan aspek sosial berupa partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat dengan sekitarnya (Firdaus & Nurini, 2015). Kualitas lingkungan menunjukkan suatu kondisi ideal yang diperoleh melalui persepsi masyarakat sebagai pengguna ruang tersebut. Sesuai dengan hasil uji regresi yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa 6 kriteria yang dipengaruhi oleh penataan kumuh memiliki indikasi yang mendorong meningkatnya variabel *human settlement* lainnya sesuai dengan persepsi masyarakat. Kriteria berkurangnya biaya perbaikan rumah akan memicu kualitas rumah yang semakin baik, terlihat dari kondisi rumah yang semakin bersih dan terlayani air bersih.

Selanjutnya berkaitan dengan kondisi lingkungan perlu diwujudkan agar masyarakat merasa nyaman. Kondisi lingkungan yang nyaman ini tercermin pada sarana yang baik dan mendukung kegiatan masyarakat. Kondisi ini akan memberikan dampak yang cukup baik bagi menurunnya degradasi lingkungan karena akan mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Kondisi lingkungan dengan adanya penataan terlihat pada kondisi jalan yang semakin baik, peninggian bangunan rumah. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa dengan dukungan sarana dan prasarana yang baik, dan yang mendukung kegiatan masyarakat akan diikuti dengan kondisi lingkungan yang nyaman. Kondisi lingkungan yang nyaman bisa mendorong adanya suatu interaksi dalam masyarakat. Interaksi masyarakat tidak luput dari peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat.

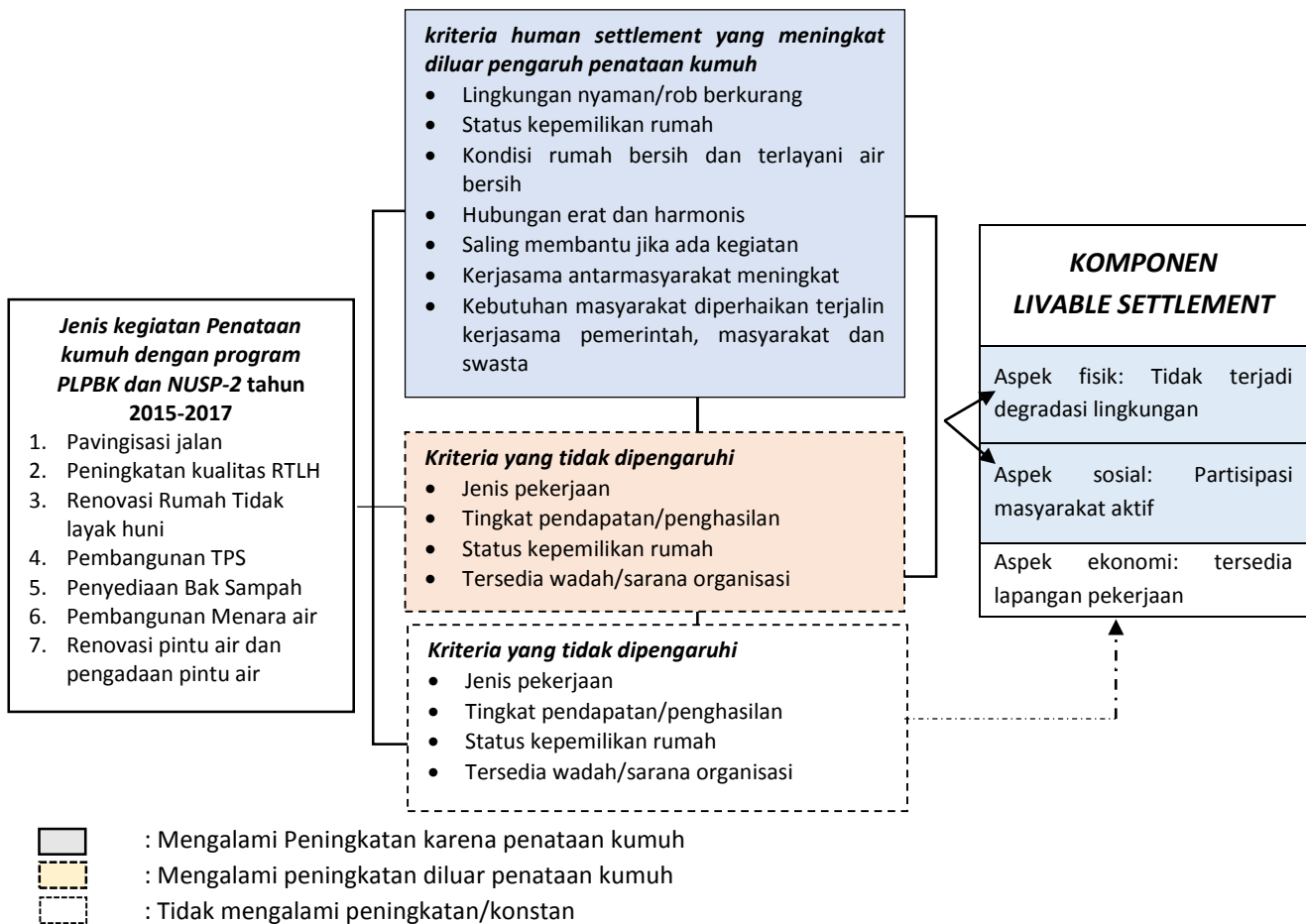
Keberhasilan suatu program atau kegiatan pembangunan dalam masyarakat perlu melibatkan kerjasama pemerintah, swasta maupun masyarakat. Sesuai dengan persepsi masyarakat, kerjasama ini tidak terlepas dari peran lembaga dalam memberikan sosialisasi. Semakin sering interaksi yang dilakukan maka hubungan masyarakat menjadi semakin harmonis dan erat dalam berinteraksi.

Kaitan dengan *livable settlement*, penataan yang dilakukan secara fisik dan sosial sudah sangat mendukung bagi tercapainya permukiman yang

nyaman. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, secara fisik menunjukkan belum semua sarana sudah layak huni dan nyaman. Sarana prasarana meliputi bangunan/rumah belum memenuhi kriteria layak huni atau sehat khususnya lantai, kondisi saluran drainase yang belum baik, ketersediaan MCK belum melayani masyarakat dan masih belum terpenuhinya sarana persampahan (TPS) dan sistem pengangkutan sampah yang memadai.

Komponen aspek sosial melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan masih terdapat masyarakat yang belum mendukung tercapainya permukiman yang nyaman. Pada kenyataannya, perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan (membuang sampah sembarangan di kali maupun di rel, dan selokan) menyebabkan kondisi lingkungan yang kotor dan kurang nyaman yang juga berpengaruh terhadap degradasi lingkungan.

Berdasarkan hasil skema (lihat Gambar 2), diketahui bahwa penataan permukiman kumuh di Kelurahan Tambakrejo tidak secara seimbang mendorong atau mendukung masing-masing komponen *human settlement*. Menurut teori yang dikemukakan Doxiadis (1976), kelima komponen (*man, society, shells, nature, dan network*) memiliki kedudukan yang seimbang, tetapi pada kenyataannya tidak berimbang mempengaruhi aktivitas masyarakat. Dalam penelitian ini, aspek yang paling besar dipengaruhi oleh penataan kumuh yaitu *shells, nature, society, network*, dan terakhir *manyang* berpengaruh terhadap perasaan yang timbul dan dirasakan oleh masyarakat merujuk pada tingkat kenyamanan. Berdasarkan persepsi masyarakat, terdapat 7 kriteria *human settlement* yang mengalami peningkatan tetapi tidak secara langsung dipengaruhi oleh penataan permukiman kumuh yang mengindikasikan tercapainya *livable settlement*. Peningkatan kriteria *human settlement* ini perlu dikaji lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi dan kaitannya dengan penataan kumuh, dan penyebab 4 kriteria lain yang tidak mengalami perubahan sama sekali meskipun telah ada penataan kumuh.



Gambar 2. Skema Pengaruh Penataan permukiman kumuh untuk mencapai *Livable Settlement* di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang

4. KESIMPULAN

Pengaruh penataan permukiman kumuh yang dilakukan di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang belum mampu mewujudkan *livable settlement* khususnya pada aspek ekonomi. Penataan kumuh di kelurahan ini hanya mempengaruhi 2 aspek *livable settlement* yaitu secara fisik (tidak terjadi degradasi lingkungan), dan secara sosial (partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan), sementara aspek ekonomi (penyediaan lapangan pekerjaan) masih belum dipengaruhi oleh program penataan. Secara fisik menunjukkan bahwa belum semua sarana prasarana sudah layak huni dan nyaman, terlihat pada kondisi dan ketersediaannya. Selanjutnya, pada aspek sosial partisipasi masyarakat dinilai sudah cukup baik, hanya saja masih ada perilaku masyarakat yang belum sadar lingkungan. Penilaian masyarakat tentang *human settlement* dalam pencapaian *livable settlement* harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan. Terdapat beberapa kriteria *human settlement* yang mengalami peningkatan diluar pengaruh penataan kumuh, dan ada juga yang tidak terpengaruh sama

sekali (konstan). Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya bisa dikaji lebih mendalam mengenai kontribusi antarkriteria *human settlement* yang dipengaruhi oleh penataan kumuh mendukung *livable settlement* karena terdapat beberapa kriteria *human settlement* yang mengalami peningkatan diluar pengaruh penataan kumuh, dan ada juga yang tidak terpengaruh sama sekali (konstan) dan faktor-faktor lain yang turut mendukung dalam mencapai permukiman layak huni di luar program penataan permukiman kumuh PLPBK dan NUSP-2

Ucapan Terimakasih

Penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik tidak lepas dari dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada (1) Tuhan Yang Maha Esa; (2) Bapak Dr. Ir. Hadi Wahyono, MA selaku ketua Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota; (3) Ibu Dr. Sunarti, S.T, M.T yang memberikan dukungan dan arahan dalam penyusunan penelitian; (4) Ibu Diah Intan Kusumo yang memberikan masukan selama ujian; (5) Bapak Dr.-Ing Asnawi S.T yang memberikan

saran dan perbaikan; dan (6) semua pihak yang mendukung dalam penyelesaian tugas akhir

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, P. S., & Usman, H. (2006). *Pengantar Statistika Edisi Kedua*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Alit, I. K. (2005). Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Propinsi Bali. *Jurnal Permukiman Natak*, 3(1), 34-44.
- BAPPEDA Kota Semarang. (2011). *Peta Administrasi Kota Semarang*. Semarang: BAPPEDA Kota Semarang.
- Chandramouli, I. (2003). *Slums in Chennai: A profile*. Paper presented at the Third International Conference on Environment and Health.
- Dinas Permukiman Kota Semarang. (2015). *Dokumen Teknis Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)*. Retrieved from Semarang:
- Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang. (2016). *Dokumen NUSP-2 Kota Semarang tahun 2015-2016*. Retrieved from Semarang:
- Doxiadis, C. (1976). Predicament for Human Settlements. *International Journal of Environmental Studies*, 9(1), 11-19.
- Firdaus, F. M., & Nurini, N. (2015). Arahan Penataan Kampung Nelayan Kejawan Lor Dengan Konsep Livable Settlement Pantai Kenjeran, Surabaya. *Ruang*, 1(4), 201-210.
- Hariyanto, A. (2010). Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Sehat (Contoh Kasus: Kota Pangkalpinang). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota UNISBA*, 7(2), 11-37.
- Santoso, E. B., & Therik, L. V. (2016). Faktor Penentu Bertempat Tinggal Pada Kawasan Kumuh Di Kota Malang Berdasarkan Teori Doxiadis. *TATALOKA*, 18(4), 261-273.
- Sariffuddin, S., & Susanti, R. (2011). Penilaian Kesejahteraan Masyarakat untuk Mendukung Permukiman Berkelanjutan di Kelurahan Terboyo Wetan, Semarang. *Makara, Sosial Humaniora*, 15(1), 29-42.
- Silondae, I. U. (2010). *Kondisi Lingkungan Perumahan dalam Konteks Kenyamanan Hidup (Studi Kasus: Perumahan Kendari Permai Kota Kendari)*. Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. W., & Endrayanto, P. (2012). *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- UN Habitat. (2003). *Slums of the World: the Face of Urban Poverty in the New Millennium. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme*.
- Yulianti, B. P., Baiquni, M., Ritohardoyo, S., Yunus, H. S., & Setiawan, B. (2016). Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Peremajaan Kawasan Tegalpanggung di Kota Yogyakarta). *Majalah Geografi Indonesia*, 29(1), 7-18.